

Menemukan Historiografi Indonesiasentris

JILID

1



Editor:
Sri Margana
Retno Sekarningrum
Ahmad Faisol

**MENEMUKAN HISTORIOGRAFI
INDONESIASENTRIS**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

MENEMUKAN HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS

Copyright © Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia (PPSI),
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan Departemen Sejarah UGM, 2017

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2017.
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

facebook: Penerbit OmbakTiga

website: www.penerbitombak.com

PO.782.12.17

Editor: Sri Margana, Retno Sekarningrum dan Ahmad Faisol

Tata letak: Ridwan

Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MENEMUKAN HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017

xix + 825 hlm. ; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-477-3

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ~ ix

Pengantar Direktur Sejarah ~ xi

Pengantar Editor ~ xiv

Tinjauan Historiografis Penelitian Sejarah Revolusi Indonesia di Bali (Respons Pemuda terhadap Revolusi Indonesia di Bali) ~ 1

A.A Bagus Wirawan, A.A. Ayu Rai Wahyuni

Beyond the Historiography: Film Dokumenter Sejarah sebagai Alternatif Historiografi di Indonesia ~ 27

Aan Ratmanto

Kampung Riwayatmu Dulu: Diskursus Historiografi Kampung sebagai Kontra Hegemoni Sejarah Nasional Indonesia ~ 34

Adi Putra Surya Wardhana

Penyelamatan Arsip dalam Historiografi Nasional (Sebuah Kajian Didaktik) ~ 50

Agung Ismawarno

Narasi dalam Lagu Pop Daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur ~ 73

Ans. Prawati Yuliantari

Studi Kewilayahan dan Penulisan Sejarah Indonesia: Menimbang Ulang Penulisan Sejarah Pergerakan Nasional Awal Abad ke-20 ~ 88

Andi Achdian

Menjahit Laut Nusantara Menguatkan Keindonesiaan

(Telaah Menguatnya Identitas NKRI dalam Sejarah Maritim) ~ 102

Andi Ima Kesuma

Historiografi Soto: Jejak Metodologis Sejarah Kosmopolitanisme Indonesia ~ 118

Ary Budiyanto

Nasionalisme Kerbau: Symbolisme Satwa dalam Pencarian Identitas Keindonesiaan ~ 145

Budi Gustaman

Menimbang Tradisi Lisan Dayak dalam Penulisan Sejarah Kalimantan ~ 158

Dana Listiana

Historiografi dan Identitas Ulu di Sumatera Selatan ~ 168

Dedi Irwanto

Makanan dalam Sejarah, Sejarah dalam Makanan: Mengolah Makanan sebagai sebuah Kajian Historiografi ~ 182

Fadly Rahman

Selebritas Masa Lalu: Studi Kasus Penelitian Biografi Tan Tjeng Bok dan Karyanya ~ 196

Fandy Hutari

Dokter, Sejarah Kedokteran, dan Historiografi Kita ~ 204

Gani A. Jaelani

Sejarah dan Fakta Kekinian: Historiografi Wanita (*Jugun Ianfu*) Masa Pendudukan Jepang di Indonesia ~ 221

Hany Nurpratiwi

Kajian Tentang Sejarah Komunitas Tionghoa di Sulawesi Utara: Aspek Metodologi dan Pengalaman Lapangan ~ 229

Hendri Gunawan

Membayangkan Indonesia dari Kacamata Kriminal Gagaklodra 1932-1953 ~ 244

Heri Kusuma Tarupay

Menemukan Karakter Historiografi Umat Islam Indonesia ~ 267

Himayatul Ittihadiyah

Historiografi Komunisme dalam Sejarah Nasional: Bali, Jawa Timur dan Catatan Pinggiran dari *Mainstream* Historiografi Indonesia ~ 283

I Ketut Ardhana

Modernitas Perkotaan: Membayangkan Kota dan Tema Historiografi Perkotaan di Indonesia ~ 301

Ilham Daeng Makkelo

Film sebagai Alat Propaganda Rezim Penguasa ~ 322

Ilmiawati Safitri

Sumber Sejarah bagi Era Milenial: Pewarnaan Foto dan Meme Sejarah ~ 339

Iman Zanatul Haeri

Ulama dan Islam Indonesia: Perkembangan Kajian dan Kecenderungan Metodologi ~ 361

Jajat Burhanudin

Penulisan Sejarah Seni Rupa: Lukisan-lukisan Koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia ~ 396

Mikke Susanto

Historiografi yang Terlewatkan: Pemerintahan Peralihan di Yogyakarta 1 Mei 1949- 30 Juli 1949 ~ 416

Murdiyah Winarti

Mnemohistory dan Problem Historiografi di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kenangan Masa Perang Dunia II di Kendari ~ 424

Nasihin

Historiografi dan Pahlawan Nasional ~ 431

Nina Herlina

Narasi Nasionalisme dan Logika Oposisi Biner dalam Buku Teks Sejarah dari Orde Baru hingga Post-reformasi ~ 436

Nur Fatah, Abidin

Mencari Ken Dedes: Sisi Lain Rekonstruksi Majapahit dalam Sejarah Nasional Indonesia ~ 461

Panggah Ardiyansyah

Keragaman Tafsir dalam Narasi Sejarah Pasar: Sebuah Peluang Mengembangkan Historiografi Tematis ~ 484

Putri Agus Wijayati

Historiografi Olahraga: Problematika dan Tantangan Penulisannya ~ 493

R.N. Bayu Aji

Berpisah untuk Bertemu: Hubungan Baru Ilmu Kearsipan dengan Ilmu Sejarah ~ 498

Raistiwar Pratama

Dari Nisan ke Informan: Penggunaan Sumber Alternatif dalam Penulisan Sejarah Indonesia ~ 508

Ravando Lie dan FX Harsono

Kajian Heuristik pada Novel Sejarah Pramoedya Ananta Toer ~ 516

Rudy Gunawan

Membaca Tutur Perempuan dalam Historiografi Sejarah Perempuan Indonesia ~ 529

Siti Utami Dewi Ningrum

Negara dan Pengelolaan Kemaritiman: Menggagas Historiografi Laut dalam Perspektif *Total History* ~ 544

Subandi Rianto

Pseudo-Babada di Banyumas dalam Arus Perkembangan Historiografi Tradisional Jawa ~ 555

Sugeng Priyadi

***Space, Place, and History*: Studi Perbanditan di Polongbangkeng, Takalar, Sulawesi Selatan ~ 569**

Taufik Ahmad

Perdagangan Merajut Persatuan di Kepulauan Nusantara ~ 594

Tundjung

Hagiografi dan Perkembangannya: Studi Hagiografi Sunan-sunan Penyebar Islam di Jawa Timur ~ 605

Ulum Fasih

Menemukan Indonesiasentris dalam Historiografi Bugis ~ 622

Umar Muda

Museum sebagai Historiografi dalam Pendidikan Kebhinnekaan Indonesia ~ 631

Wahyu Suri Yani

Pendekatan Transnasional dalam Sejarah Indonesia: Tinjauan, Batasan, dan Kesempatan ~ 646

Wildan Sena Utama

Lokalitas Budaya dan Globalitas Perbudakan Laut Hindia: Kritik dan Wacana Historiografi Perbudakan Indonesia ~ 663

Yayum Kumai

Historiografi Arsitektur Kesenjangan dalam Meneliti, Teori dan Praktik ~ 671

Yuke Ardhiati

Membaca Kembali Sejarah Industri Gula di Indonesia ~ 688

Wasino

Dua Setengah Abad Pencarian Sejarah Nasional dan 60 Tahun Penemuan Sejarah Nasional Indonesia ~ 697

Dias Pradadimara

Kajian tentang Sejarah Perkotaan di Indonesia Pada Masa Kolonial Sampai Awal Kemerdekaan ~ 709

Purnawan Basundoro

Penulisan Sejarah Lingkungan di Indonesia ~ 723

Nawiyanto

Penulisan Sejarah Indonesia dengan Pendekatan Perspektif Global/Regional ~ 739

Linda Sunarti

Historiografi Seni Pertunjukan Jawa: Perkembangan, Metodologi, dan Pemanfaatannya (Sebuah Kajian Awal) ~ 737

Dhanang Respati Puguh

Perkembangan dan Perluasan Tema dalam Historiografi Batavia ~ 778

Bondan Kanumoyoso

Militer dalam Historiografi Indonesia ~ 796

Kusuma

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dari Sudut Pandang Berita Koran Berbahasa Belanda 1957-1958: Sebuah Kajian Historiografi ~ 810

Abdul Hafiz

PENGANTAR PENERBIT

Pada 14-18 Desember 1957, bertempat di kampus Universitas Gadjah Mada, di Siti Hinggil Keraton Kesultanan Yogyakarta diadakan Seminar Sejarah (Indonesia) oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seminar sejarah yang diadakan empat hari itu diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Seminar sejarah ini baru pertama kali diadakan dalam atmosfer kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamkan dua belas tahun sebelumnya, 17 Agustus 1945. Seminar sejarah itu dimaksudkan sekadar untuk mengumpulkan pelbagai pendapat dan saran-saran sebagai bahan-bahan yang berharga untuk menyusun, di kemudian hari, sejarah nasional Indonesia yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Enam puluh tahun kemudian, pada 14-16 Desember 2017, di Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, diadakan suatu acara untuk memperingati enam puluh tahun seminar sejarah 1957, dengan tema "Sejarah untuk Kebhinnekaan dan Keindonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia". Acara ini diselenggarakan atas inisiatif bersama dari Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia (PPSI) dan pengurus pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dengan mendapat dukungan dana dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PPSI dan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM serta didukung oleh Penerbit Ombak Yogyakarta. Rangkaian acara peringatan Seminar Sejarah Nasional tersebut diisi dengan beberapa sesi pemakalah. Kumpulan makalah tersebut kemudian dibukukan ke dalam empat jilid dengan mengangkat empat tema besar: Jilid 1 Historiografi; Jilid 2 Pluralisme dan Identitas; Jilid 3 Agama dan Negara, dan Jilid 4 Pendidikan Sejarah.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional, khususnya kepada Dr. Sri Margana selaku Ketua Panitia, yang memberi kepercayaan kepada Penerbit Ombak untuk menerbitkan kumpulan tulisan seminar di atas. Selain itu, kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam penerbitan ini. Waktu yang sangat terbatas untuk menerbitkan empat jilid buku dengan total 2300-an halaman, bukanlah waktu normal dalam proses penerbitan.

Kami berharap, dengan penerbitan prosiding ini bisa membantu pendokumentasian berbagai pemikiran kesejarahan yang berkembang di Tanah Air dan memberi kesempatan kepada pembaca untuk bertamasya ke masa silam, serta membukakan pintu bagi masa depan. Selamat membaca. Terima kasih.

PENGANTAR DIREKTUR SEJARAH PROSIDING PERINGATAN 60 TAHUN SEMINAR SEJARAH NASIONAL PERTAMA, 1957-2017

Enam puluh tahun lalu, tepat pada 14 Desember 1957, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama para sejarawan, budayawan, guru, politisi dan masyarakat menggagas penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional I (SSN I) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penyelenggaraan SSN I dapat dikatakan sebagai kulminasi dalam pencarian dan perdebatan mengenai identitas nasional yang dimulai sejak 1950-an. Sebagai negara yang baru lepas dari cengkraman penjajah, Indonesia memerlukan narasi sejarah yang dituliskan melalui perspektif anak bangsa, bukan orang-orang yang datang. Kepustakaan sejarah Indonesia kala itu lebih banyak menekankan peranan orang-orang Eropa, sedangkan masyarakat Indonesia tidak lebih sebagai objek ekspansi. Oleh karena itu, masa ini menjadi titik tolak kesadaran sejarah Indonesia baru sekaligus menentukan visi penulisan sejarah bangsa dari yang sebelumnya bersifat neerlandosentrisme menjadi indonesiasentrisme. Seminar Sejarah Nasional I mengangkat beberapa tema penting yang meliputi filsafat sejarah nasional, periodisasi sejarah Indonesia dan pendidikan sejarah.

Seminar Sejarah I yang diselenggarakan pada 1957 merupakan penanda dan pembuka zaman baru historiografi, yang oleh Sartono Kartodirdjo disebut sebagai "mercusuar" yang menunjukkan arah pelayaran historiografi nasional. Pada 1970, diselenggarakan Seminar Sejarah Nasional II (SSN II) sebagai kelanjutan dari SSN I. Pada seminar ini isu-isu dalam SSN I masih menghangatkan perdebatan. Baru pada Seminar Sejarah Nasional III (SSN III) di Jakarta pada 1981 seminar berusaha menjawab tantangan ilmu sosial dalam pengkajian ilmu sejarah. Seminar ini mendorong perlunya aspek teoritik dan metodologis dalam penulisan sejarah. Selanjutnya selama berturut-turut Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1990.

Selain merumuskan berbagai temuan baru dan memetakan kecenderungan pengkajian sejarah, penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional cukup berperan dalam mengairahkan pengkajian ilmu sejarah yang kemudian berdampak pada produksi karya sejarah anak bangsa. Sejak 1980 Direktorat Sejarah dan Nilai

Tradisional juga turut andil dalam pengakayaan historiografi nasional melalui proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Berbagai karya sejarah berupa biografi tokoh, sejarah perlawanan terhadap penjajah, sejarah lokal, sejarah organisasi dan peristiwa dihasilkan oleh lembaga ini.

Kesadaran masyarakat terhadap perkembangan ilmu sejarah kian meningkat dengan terselenggaranya berbagai seminar, loka karya, *workshop*, konferensi kesejarahan, baik yang diadakan secara swadaya oleh masyarakat maupun kerjasama dengan pemerintah. Misalnya, pada 2016, Pemerintah melalui Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah X di Jakarta. Konferensi tersebut mengusung tema "*Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Perspektif Sejarah*". Konferensi diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun luar negeri. Terselenggaranya kegiatan tersebut tidak lepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pada 2017 dengan mengusung semangat Peringatan 60 (enam puluh) tahun Seminar Sejarah Nasional pertama, Perkumpulan Program-program studi (Prodi) Sejarah Seluruh Indonesia dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) bekerjasama dengan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, 1957-2017. Selain dalam rangka memperingati 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, kegiatan ini bagian dari respon berbagai pertanyaan pokok dalam Sejarah Nasional Pertama dan respon berbagai permasalahan bangsa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Toleransi dan anti-pluralisme menjadi isu nasional yang menghangatkan telinga kita akhir-akhir ini. Oleh karena itu, ilmu sejarah harus hadir mengambil bagian dalam merespon pelbagai permasalahan dan tantangan bangsa. Terselenggaranya kegiatan ini juga bertujuan merumuskan bentuk pendidikan dan penulisan sejarah dalam bingkai kebinekaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum silaturahmi, pertukaran pengalaman dan ilmu pengetahuan dari pendidik dan peneliti sejarah.

Peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Nasional Pertama, 1957-2017 mengusung tema "*Sejarah untuk Kebinekaan dan Ke-Indonesiaan: Refleksi 60 tahun Seminar Sejarah Nasional*". Empat subtema pokok diangkat dalam seminar ini, antara lain, (1) Menemukan Historiografi Indonesiasentris, (2) Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan, (3) Agama dan Negara: Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan serta (4) Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia. Kegiatan diisi oleh peserta pembicara undangan dan peserta pemakalah umum yang berjumlah 165 peserta dan empat *keynote speaker*, yaitu Dr. Hilmar Farid, Ph.D, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., dan Dr. Muhamad Ali.

Kami mengapresiasi dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Tidak hanya sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya ilmu sejarah dalam pembangunan nasional, namun juga bagian dari sinergitas yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Tidak sampai disitu, kegiatan ini adalah sarana untuk memetakan kecenderungan pengkajian ilmu sejarah belakangan ini dan kaitannya dengan arah pembangunan nasional. Kami berharap, prosiding yang berisikan kompilasi karya sejarah ini tidak berhenti pada karya cetak saja, namun lebih jauh dapat mendorong dan bersumbangsih dalam merespon dan menjawab berbagi isu nasional belakangan ini, utamanya dalam merumuskan sejarah Indonesia yang sarat akan nilai kebinekaan, dengan harapan terwujudnya Indonesia yang beragam, toleran dan berkemajuan.

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

PENGANTAR EDITOR

Kampus Universitas Gadjah Mada di Siti Hinggil Kraton Kesultanan Yogyakarta menjadi saksi bisu dari perdebatan yang menarik antara Muhammad Yamin dan Soejatmoko tentang filsafat sejarah nasional. Perdebatan ini berlangsung dalam sebuah perhelatan akademik pertama dari para perintis historiografi Indonesia yang berlangsung 60 tahun yang lalu tepatnya pada 14–18 Desember 1957. Dalam hajatan akademis yang kemudian dikenal dengan Seminar Sejarah Nasional I ini Muhammad Yamin memresentasikan butir-butir pemikiran filsafat sejarah nasional yang ia sebuat dengan “Catur-Sila Khalduniah” yaitu empat dalil filsafat kesejarahan yang dirujuk dari seorang filosof sejarah besar Ibnu Khaldun. Pada saat yang sama, Soejatmoko memaparkan pemikiran sejarahnya yang diberinya judul “Merintis Hari Depan”. Menurut Muhammad Yamin kajian sejarah modern Indonesia harus dilakukan pada kaedah ilmiah dan berjiwa nasionalitik yang hasilnya dapat berfungsi menumbuhkan kesadaran nasional. Namun menurut Soejatmoko, kajian seperti ini akan membawa sejarah pada subyektisme yang mengesampingkan kaidah-kaidah ilmiahnya.

Euforia nasionalisme memang masih sangat kental di masa itu khususnya dikalangan nasionalis yang hendak melihat negara-bangsa yang baru 12 tahun diproklamirkan itu dapat selamat sampai tujuan utama proklamasi itu sendiri. Seminar ini juga diselenggarakan pada saat isu-isu separatisme dan perpecahan politik di Indonesia masih dirasakan bersama-sama. Sehingga, pandangan dan pemikiran populis Muhammad Yamin ini mendapat dukungan yang luas di kalangan peserta seminar.

Persoalan tentang filsafat sejarah nasional memang menjadi agenda pertama dalam seminar sejarah pertama ini, dan perdebatan ini sebenarnya tidak pernah berakhir hingga kini. Sekalipun konsepsi filsafat sejarah yang nasionalistik terus dibawa bahkan cenderung menguat pada masa Orde Baru, namun di lingkup akademik konsep filsafati sejarah nasional ini terus dipertanyakan, apalagi dalam perjalanannya muncul kecenderungan ke arah mitologisasi sejarah. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Soejatmoko sejak awal ini rupanya terbukti dengan kecenderungan mitologisasi sejarah ini. Banyak peristiwa sejarah nasional yang dijadikan tonggak hari-hari bersejarah nasional yang landasan historisnya mulai

dipertanyakan. Sejarawan senior Taufik Abdullah dan juga Kuntowijoyo dalam beberapa karyanya banyak menyajikan persoalan mitologisasi sejarah ini.

Disadari bahwa memang tantangan-tantangan baru bagi bangsa ini telah muncul dengan adanya perubahan dalam ekonomi dan politik global, namun pada saat yang sama tantangan dan persoalan lama masih terus muncul kembali menghampiri bangsa ini. Saat sistem ekonomi dan politik global dunia berubah ke arah yang semakin dikendalikan oleh perkembangan teknologi dan informasi, isu-isu duniapun bergeser ke arah persoalan HAM, lingkungan, pangan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, persoalan klasik identitas etnis dan agama, keberagaman dan toleransi juga bangkit kembali. Oleh karena itu menjadi penting barangkali untuk memikirkan kembali perdebatan yang telah muncul sejak 60 tahun lalu antara Muhammad Yamin dan Soejatmoko pada arah mana sebenarnya penulisan sejarah Indonesia ke depan hendak diarahkan. Apakah pemupukan mitos-mitos nasionalisme ini masih perlu dilanjutkan ataukah kita harus mendekonstruksikan diri belajar berdamai pada sejarah bangsa sendiri, baik pengalaman yang buruk maupun yang baik untuk merintis hari depan bangsa seperti yang diinginkan Soejatmoko.

Tema utama kedua yang didiskusikan dalam seminar itu adalah tentang periodisasi sejarah Indonesia. Dua pembicara utama tampil dalam panel ini, yaitu Soekanto dan A. Sartono Kardodirdjo. Soekanto mengajukan pembabakan waktu dalam sejarah Indonesia berdasarkan konsepsi politik dan pergantian administrasi kekuasaan atau rejim. Sehingga yang muncul adalah periodisasi "Masa Pangkal Sejarah, Masa Kutai-Taruma, Masa Sriwijaya-Medang-Singasari, Masa Majapahit, Masa Kerajaan-kerajaan Islam, Masa Pemerintahan Asing dan Masa Republik Indonesia 1945". Sartono Kartodirdjo mengajukan konsep periodisasi sejarah Indonesia berdasarkan proses integrasi bangsa, sehingga yang muncul adalah babagan sbb: "Zaman Pra Sejarah, Zaman Kuna (Masa-masa Kerajaan Hindu-Buda), Zaman Baru (masa-masa kerajaan-kerajaan Islam, perlawanan terhadap imperialism Barat, masa pergerakan nasional dan masa Republik Indonesia).

Perubahan dalam masyarakat memang tidak dapat dipenggal dalam hari, tanggal, bulan, maupun tahun, namun karena kaburnya batas-batas dalam perubahan sejarah itu, maka sejarawan perlu menetapkan periodisasi untuk memetakan fase perubahan dan perkembangan sejarah. Di sinilah letak periodisasi sejarah diperlukan. Pandangan yang positif dalam gerak sejarah ini memang hal umum yang diterima dalam historiografi setiap bangsa, sehingga pemikiran terhadap periodisasi dalam sejarah ini menjadi penting. Pada praktiknya usulan Soekanto lebih mendominasi dalam pembabagan sejarah di Indonesia, sehingga perkembangan sejarah Indonesia terkesan sangat politis. Bahkan seorang mahasiswa doktoral sekalipun ketika mengaji sejarah sosial, seni dan pertunjukkan pun masih sering menggunakan kategori politik sebagai penggalan temporalnya. Sehingga kesan umum dari pelajar yang membaca buku sejarah Indonesia, Sejarah

Indonesia tidak lain adalah sejarah tentang pergantian rejim. Sejarah seperti ini melahirkan tokoh-tokoh sejarah Indonesia dari para pelaku politik, seperti politisi dan pemimpin perang, yang kemudian beramai-ramai diajukan sebagai pahlawan nasional. Sangat sedikit pelajar Indonesia mengenal tokoh-tokoh sejarah penting dari kalangan penemu (ilmuwan), filosof, ataupun sastrawan seperti yang kita pelajari dalam historiografi Barat.

Tampak di sini bahwa periodisasi yang didasarkan pada konsepsi politik dan pergantian rezim akan mereduksi kekayaan tematik dalam sejarah Indonesia dan mebatasi pemahaman bangsa tentang capaian-capaian besar diberbagai bidang yang pernah diraih bangsa ini. Tema ini memang tidak secara spesifik dibicarakan dalam memperingati 60 tahun Seminar Sejarah Nasional I ini, namun sengaja menampilkan makalah-makalah dengan berbagai tema historiografi yang cukup luas. Dari keragaman tema historiografi yang diangkat dalam seminar ini tentu menjadi titik tolak penting ke depan untuk memikirkan ulang Periodisasi Sejarah Nasional yang lebih dapat mengakomodasi keragaman tematik ini.

Setelah 12 tahun merdeka, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki sejarah nasionalnya sendiri. Sehingga, pertanyaan tentang perlunya Sejarah Nasional dan syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan Sejarah Nasional menjadi agenda penting lain yang dibicarakan dalam Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 itu. Rupanya hal ini bukan persoalan yang mudah untuk diwujudkan, karena 13 tahun kemudian dalam Seminar Sejarah Nasional II yang juga diselenggarakan di UGM Yogyakarta, persoalan ini kembali dibahas secara serius. Lima tahun kemudian, pada tahun 1975, buku yang diharapkan muncul dalam enam jilid. Dengan kata lain, butuh 30 tahun setelah bangsa ini merdeka keinginan memiliki buku babon sejarah Nasional itu dapat diwujudkan. Kita mengetahui juga bahwa sejak masa-masa akhir rejim Orde Baru, kredibilitas buku ini menjadi pertanyaan besar bagi para sejarawan Indonesia generasi baru dan munculnya IDAS (Indonesia Dalam Arus Sejarah), sebagaimana dari tuntutan atas perlunya revisi dan penambahan substansi sejarah Nasional Indonesia yang ditulis 47 tahun yang lalu itu dapat dipenuhi.

Agenda penting ke-empat yang dibicarakan pada Seminar Sejarah Nasional I 1957 adalah tentang "pengajaran" sejarah Indonesia di sekolah-sekolah. Persoalan bertumpu pada materi pengajaran, jenjang dan tentunya buku-buku pelajaran sejarah yang masih sangat minim dan masih didominasi oleh buku pelajaran yang ditulis oleh para penulis Belanda dan berbahasa Belanda. Dari tema ini tampak bahwa sejak awal telah disadari bahwa pengajaran sejarah tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebutuhan nasional terhadap sejarah sebagai dasar bagi membangun "good citizenship" yang ditandai dari lekatnya nilai-nilai nasionalisme pada setiap individu bangsa. Pada prosiding ini permasalahan "pengajaran" atau sekarang lebih cenderung menggunakan istilah "pendidikan" telah bergerak dari permasalahan

KAJIAN TENTANG SEJARAH PERKOTAAN DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL SAMPAI AWAL KEMERDEKAAN

Purnawan Basundoro
Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga

Abstrak

Historiografi perkotaan di Indonesia oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai hal baru dan sampai tahun 1990an belum diperhatikan secara serius oleh para sejarawan, khususnya sejarawan Indonesia. Perhatian para sejarawan sampai periode tersebut masih tertuju pada wilayah pedesaan, bahkan di beberapa jurusan sejarah hal tersebut menjadi bahan kajian utama. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena secara politis pedesaan dianggap lebih mewakili sebagian besar realitas Indonesia sejak masa kolonial. Kebijakan politik kekuasaan Indonesia sejak masa kolonial sampai paling tidak masa Orde Baru masih tertuju pada wilayah-wilayah pedesaan yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi (misalnya kebijakan Tanam Paksa) serta menguntungkan secara politis (misalnya kebijakan revolusi hijau). Namun demikian bukan berarti perhatian terhadap kota dan sejarah perkotaan tidak ada sama sekali. Orang-orang Eropa, sejak kedatangannya yang pertama kali di Indonesia, sebenarnya sudah mulai memperhatikan perkotaan karena di wilayah-wilayah inilah mereka tinggal. Sedikit demi sedikit mereka membangun kota sekaligus memperhatikannya menjadi sebuah kajian akademik. Kajian perkotaan di Indonesia pada masa kolonial sampai awal kemerdekaan cukup banyak, yang sebagian besar dilakukan oleh para sarjana Barat yang pernah datang dan bermukim di Indonesia ataupun oleh mereka yang hanya tertarik terhadap kota-kota di Indonesia namun belum pernah berkunjung ke Indonesia. Makalah ini akan menguraikan hal tersebut, kota-kota mana saja yang menjadi pusat perhatian mereka dan dikajinya, siapa saja yang mengkaji, dan apa yang menjadi perhatian utama mereka.

Pendahuluan

Sejak fenomena perkotaan muncul di bumi, sejak saat itu pulalah perkotaan menjadi pusat perhatian. Pada awalnya perhatian manusia terhadap kota tertuju pada ujud fisiknya karena kota-kota pada periode awal tumbuh sebagai ruang yang sangat berbeda dengan kawasan sekitarnya. Kota tumbuh menjadi entitas yang berkebalikan dengan desa atau kawasan geografis lainnya. Kota-kota pun menarik perhatian para penghuni pedesaan untuk berbondong-bondong mendatanginya, sehingga kota-kota awal yang tumbuh di Mesir, Babylonia, Yunani, dan Romawi berkembang menjadi pusat pertumbuhan penduduk akibat banjir para pendatang dari kawasan sekitar. Kota Atena pada periode awal misalnya, ketika kawasan di sekitar kota tersebut masih dihuni oleh ratusan atau bahkan puluhan penduduk saja, Atena sudah dihuni lebih dari 20.000 penduduk. Konsentrasi penduduk yang besar tersebut menunjukkan bahwa kota memang lebih menarik perhatian dibandingkan kawasan lain.

Pada periode kontemporer perhatian masyarakat terhadap kota semakin besar. Kota menjadi gantungan nasib bagi sebagian besar penduduk di berbagai belahan dunia. Akibatnya, kota menjadi kawasan yang tumbuh membesar dengan jumlah penduduk yang dari hari ke hari semakin padat. Sebagian besar kota di Indonesia misalnya, memiliki jumlah penduduk di atas satu juta orang. Dampak pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di perkotaan menjadikan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan yang unik yang sangat berbeda dengan kawasan lainnya. Kota tumbuh menjadi kawasan dengan sejuta harapan, tetapi juga berkembang menjadi kawasan dengan sejuta permasalahan.

Keunikan kota telah menarik perhatian akademisi untuk mengkajinya. Beragam pengetahuan lahir dari realitas perkotaan, seperti sosiologi perkotaan, antropologi perkotaan, arsitektur perkotaan, tata kota, sejarah perkotaan, politik perkotaan, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu tercetak berbagai literatur yang menghimpun berbagai pengetahuan yang berbasis perkotaan. Di Indonesia kajian perkotaan merupakan hal baru. Kajian ini lahir pada periode akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Periode tersebut merupakan periode pertumbuhan kota-kota di Indonesia yang berkembang akibat praktek liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan kota-kota di Indonesia menjadi kota modern sebagai basis kegiatan perekonomian. Berbagai kota telah berubah dari sekadar pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan dan industry. Akibatnya, berbagai persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik muncul di perkotaan. Hal tersebut menarik perhatian para pemerhati perkotaan.

Tulisan ini akan memaparkan hasil kajian para ahli perkotaan tentang kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota besar di Jawa sejak masa kolonial sampai awal kemerdekaan. Mengingat ruang yang terbatas, maka hanya kajian yang penting

saja yang akan diulas dalam tulisan ini. Ulasan akan berdasarkan kajian-kajian yang lebih bersifat historiografis atau kajian sejarah yang pernah dilakukan pada masa colonial sampaiawalkemerdekaan.

Kajian Perkotaan pada Masa Kolonial

Perhatian utama kolonialisme Belanda di Indonesia sampai akhir abad ke-19 adalah kawasan pedesaan. Hal ini terkait erat dengan kebijakan eksploitatif mereka yang ditujukan ke kawasan pedesaan dalam bentuk perkebunan. Sejak digulirkan kebijakan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, kawasan pedesaan merupakan primadona, karena dari sinilah mengalir jutaan ton komoditi perkebunan yang menjelma menjadi uang jutaan gulden yang diangkut ke negeri Belanda. Perhatian teknis terhadap pedesaan ternyata berimbans secara akademis, karena secara faktual kajian atau studi terhadap pedesaan juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kajian terhadap perkotaan. Pada periode kolonial buku-buku yang membahas tentang kota-kota di Indonesia masih sangat sedikit.

Buku paling awal yang membahas kota di Indonesia sepengetahuan penulis adalah buku yang menceritakan sejarah Kota Jakarta, ditulis oleh P. de Roo de La Faille. Judul asli buku tersebut tidak penulis ketahui karena penulis hanya menemukan edisi terjemahan bahasa Melayu dengan judul *Kota Betawi Semasa Dahoeloe*. Penerjemahan ke bahasa Melayu dilakukan oleh S.M. Rassat dan diterbitkan oleh Balai Poestaka tahun 1920. Secara ringkas buku tersebut menceritakan awal mula berdirinya Kota Jakarta serta perjalanan kota tersebut sampai akhir abad ke-18. Buku ini dilengkapi beberapa sketsa suasana Kota Jakarta pada masa-masa awal kota ini dijadikan koloni orang-orang Belanda. Melalui buku yang ditulis oleh La Faille tersebut kita bisa mengorek suasana Kota Jakarta pada periode awal.

Dua tahun setelah karya La Faille diterbitkan, terbit karya F. de Haan yang berjudul *Oud-Batavia; gedenkboek uitgegeven door het Bataviasch Genootschap van K. en W. naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan des stad in 1919*. Buku yang terbit tahun 1922 tersebut dianggap karya besar pertama tentang kota di Indonesia, sehingga Peter J.M. Nas menyebutnya sebagai karya besar (*magnum opus*) dari de Haan tentang Batavia Lama. Buku de Haan ini merupakan buku pertama yang mengulas Kota Batavia secara komprehensif, terutama pada saat kota tersebut berada di bawah kekuasaan VOC. Melalui buku ini kita mendapatkan informasi bahwa jauh sebelum pemerintah kota yang otonom dibentuk pada masa kolonial (*gemeente*), Batavia telah memiliki lembaga yang bertugas mengurus kota yang disebut *Aldermen/Schepenen*. Lembaga tersebut dibubarkan ketika Inggris menduduki Batavia tahun 1811. Buku ini memberikan sumbangan yang sangat penting terkait dengan berbagai informasi yang sangat lengkap mengenai kota Jakarta (Batavia) pada masa awal.

Satu generasi dengan de Haan, di Kota Surabaya G.H. von Faber seorang pemerhati sejarah dan budaya Kota Surabaya menulis dua karya monumental tentang sejarah Kota Surabaya. Dua karya von Faber tersebut adalah *Oud Soerabaia: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad (1906)*, terbit tahun 1931; dan *Nieuw Soerabaia: De geschiedenis van Indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931*, terbit tahun 1936. Kedua buku tersebut merupakan studi sejarah paling lengkap tentang Kota Surabaya. Pada periode yang sama, di Kota Semarang terbit buku *Riwajat Semarang* yang ditulis oleh Liem Thian Joe, dan diterbitkan oleh Boekhandel Ho Kim Joe pada tahun 1933. De Haan dan von Faber memiliki pandangan yang sama tentang kota-kota di Indonesia, bahwa kota pada hakekatnya adalah hunian masyarakat Eropa. Merekalah yang berjuang membangun kota agar menjadi tempat tinggal yang memadai dan pantas disebut sebagai kota, sementara golongan masyarakat Bumiputra hanyalah pelengkap penderita dari entitas tersebut.

Berbeda dengan de Haan dan von Faber, Liem Thian Joe memposisikan Semarang sebagai kota "Tionghoa". Dengan demikian maka pembahasan Liem Thian Joe adalah apa yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kota Semarang, sehingga kota tersebut kemudian memiliki identitas ketionghoan yang sangat kuat. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai foto yang menghiasi bagian awal buku tersebut yang menggambarkan berbagai aktivitas masyarakat Tionghoa di Kota Semarang pada masa kolonial.

Selain buku yang ditulis oleh Liem Thian Joe, di Kota Semarang juga terbit dua buku penting lain tentang kota. Buku pertama diterbitkan oleh perkumpulan pemerintah (kota) lokal, atau yang disebut *Vereeniging voor Locale Belangen*. Buku ini diterbitkan dalam rangka peringatan 25 tahun lahirnya desentralisasi di Hindia Belanda, sehingga judul bukunya adalah *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*. Desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda memang baru diterapkan pada tahun 1905 yang merupakan implemntasi dari Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 atau yang dikenal *Decentralisatie Wet 1903*. Penerapan undang-undang tersebut diawali dengan ditetapkannya beberapa kota di Hindia Belanda sebagai kota otonom yang disebut *gemeente*. Kota-kota pertama yang ditetapkan sebagai *gemeente* antara lain Batavia, Meester Cornelis, dan Bogor, yang ditetapkan tahun 1905. Sampai dengan tahun 1921 jumlah kota yang ditetapkan sebagai *gemeente* adalah 32 kota, namun dua kota kemudian dibekukan statusnya, yaitu Meester Cornelis yang kemudian digabung dengan Batavia, dan Sawah Lunto yang diturunkan statusnya sebagai kota biasa.

Buku yang disunting oleh J.W.M. Kerchman ini diawali pembahasan mengenai berbagai hal terkait dengan pembentukan kota-kota otonom di Hindia Belanda yang ditulis oleh tigabelas penulis dengan berbagai latar belakang keahlian. Yang

cukup menarik, Thomas Karsten, seorang ahli tata kota dan arsitektur yang banyak mendesain kota-kota di Indonesia pada masa kolonial menyumbang dua tulisan, yang masing-masing berjudul *Stedebouw* (Pembangunan Kota) dan *Volkshuisvesting* (Pengadaaan Perumahan Rakyat). Dua tulisan Karsten tersebut menunjukkan ketokohan yang bersangkutan dalam pembangunan kota-kota di Indonesia pada periode awal abad ke-20. Bagian akhir dari buku tersebut membahas kota-kota di Hindia Belanda yang diberi status sebagai *gemeente*. Sayangnya tidak semua kota dibahas, karena buku ini hanya membahas 22 kota dari 32 kota yang pernah ditetapkan sebagai *gemeente*. Terlepas dari hal tersebut, buku ini menjadi karya penting tentang perjalanan awal kota-kota di Indonesia ketika ditetapkan sebagai kota otonom.

Buku kedua ditulis oleh penulis dengan nama samaran, Si Tjerdik, dengan judul *Melantjong ka Soerabaia*. Buku yang diterbitkan oleh Boekhandel "Kamadjoean" ini menceritakan pengalaman Si Tjerdik yang pada tahun 1930 mengadakan perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Selama beberapa hari ia tinggal di Surabaya dan mengunjungi berbagai tempat di kota tersebut. Hasil pengamatan yang bersangkutan terhadap Kota Surabaya ia tulis secara lengkap dalam buku tersebut walaupun pembahasannya tidak terlalu detail. Salah satu hal yang menarik dari buku tersebut adalah adanya cerita Kota Surabaya pada waktu malam, yang diberi judul "Soerabaia di waktoe malem." Bagian ini menceritakan bagaimana suasana Kota Surabaya pada malam hari, apa-apa saja yang dilihat si penulis pada malam hari di kota ini. Pada waktu itu buku-buku yang membahas suasana kota di Indonesia pada malam hari masih sangat jarang, karena dinamika kota biasanya identik dengan siang hari. Sayangnya, aktivitas malam hari di Kota Surabaya yang dipotret oleh Si Tjerdik terbatas pada aktivitas yang melibatkan perempuan-perempuan dan laki-laki pencari "kesenangan" di tengah suasana kota dengan penerangan yang berkurang. Ia mengistilahkan perempuan-perempuan tersebut dengan istilah *djipro-djipro* sedangkan laki-laki yang ke sana ke mari menggoda para *djipro* disebut sebagai laki-laki hidung bodas. Buku yang dilengkapi dengan foto-foto suasana Kota Surabaya menjadi salah satu referensi penting untuk melihat suasana Kota Surabaya pada tahun 1930an.

Kota besar pada masa kolonial yang tergolong minim publikasi tentang kota bersangkutan adalah Bandung. Kota ini pada awal abad ke-20 memiliki peran yang sangat strategis karena letaknya yang sangat dekat dengan pusat kedudukan pemerintah kolonial, yaitu Batavia. Bahkan Kota Bandung sempat akan dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda, namun gagal karena keburu Jepang datang. Kajian historis tentang Kota Bandung yang ditulis pada masa kolonial nyaris tidak ada. S.A. Reitsma, seorang penulis dan pengamat perkeretaapian yang sangat produktif pada awal abad ke-20, beberapa kali mempublikasikan tulisannya tentang Kota Bandung, namun bukan studi sejarah mengenai kota tersebut. Publikasi

Reitsma adalah: *Bandoeng: The Mountain City of Netherlands India* (terbit tahun 1926);serta dua buah buku yang ditulis bersama dengan W.H. Hoogland, yaitu *Gids van Bandoeng en omstreken* (terbit tahun 1921), dan *Gids van Bandoeng en Midden-Priangan* yang terbit tahun 1927. Karya-karya Reitsma bukanlah kajian sejarah, namun hanyalah uraian mengenai Kota Bandung pada zamannya. Sama dengan penulis kolonial lainnya, Reitsma juga menempatkan Bandung sebagai kota hunian Eropa, sehingga pembahasannya juga menempatkan bangsa Eropa sebagai warga utama Kota Bandung. Orientasi utama pembangunan kota pun diperuntukkan untuk warga Eropa.

Historiografi perkotaan pada masa kolonial menempatkan kota-kota di Jawa sebagai pusat pembahasan. Kota-kota di luar Jawa belum dijadikan medan studi yang penting, yang mengakibatkan publikasi kota-kota tersebut juga sangat minim bahkan nyaris tidak ada. Hal tersebut bisa jadi merupakan imbas keterlambatan perhatian pemerintah kolonial terhadap kota-kota di luar Jawa. Kota-kota di luar Jawa hanya sedikit yang diberi status sebagai kota otonom, hanya 13 kota dari seluruh kawasan di luar Jawa, sedangkan di Jawa mencapai 19 kota. Namun demikian, Kota Yogyakarta, salah satu kota penting di Jawa bisa dikatakan merupakan suatu perkecualian. Bersama dengan Kota Solo, kota ini tidak pernah ditetapkan sebagai kota otonom (*gemeente*) pada masa kolonial. Apakah hal tersebut yang menjadi penyebab mengapa kota ini minim dijadikan objek pembahasan sejarah pada masa kolonial?

Satu buah tulisan pendek tentang Yogyakarta yang ditulis oleh H.H. van Kol dimuat dalam *Indische Gids* edisi tahun 1904 dengan judul *De Residentie Djokjakarta*. Menilik dari judulnya, tulisan Kol tersebut tidak spesifik membahas tentang Kota Yogyakarta, namun membahas karesidenan Yogyakarta yang wilayahnya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Sebagian besar publikasi tentang Yogyakarta pada periode kolonial membahas peran raja beserta Kraton Yogyakarta. Tulisan semacam ini misalnya yang dibuat oleh J. Groneman yang berjudul *Reisgids voor Jogjakarta en omstreken* yang terbit tahun 1900, serta tulisan kerabat Pura Pakualaman, Notosuroto, yang berjudul *Het Sultanaat Jogjakarta* yang terbit di Amsterdam tahun 1920.

Sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya, perhatian utama historiografi perkotaan Indonesia pada masa kolonial masih terbatas pada kota-kota di Jawa. Hal lain yang perlu diutarakan adalah, bahwa pada periode kolonial perhatian para ahli perkotaan juga masih terbatas pada kota-kota utama saja (*prime city*), yaitu kota-kota yang pada akhirnya menjadi ibukota provinsi. Kota-kota kecil setingkat ibukota kabupaten, walaupun sudah berstatus sebagai kota otonom (*gemeente*) belum menjadi perhatian yang serius untuk objek studi sejarah perkotaan. Historiografi perkotaan Indonesia yang ditulis pada masa kolonial memang belum terlalu banyak. Uniknya, historiografi perkotaan Indonesia pada

periode itu tidak dikerjakan oleh sejarawan profesional, namun dikerjakan oleh para penghobi sejarah yang tertarik dengan perkembangan kota. Karya-karya mereka menjadi pondasi yang kuat bagi historiografi perkotaan pada periode kontemporer. Studi sejarah kota-kota besar yang dilakukan oleh sejarawan pada periode sekarang, sumber datanya selalu mengacu kepada karya-karya pemula.

Masa Penjajahan Jepang sampai Awal Kemerdekaan

Periode penjajahan Jepang adalah periode suramnya dunia akademik di Indonesia. Periode penjajahan Jepang diawali dengan ditutupnya berbagai lembaga pendidikan tinggi yang pernah eksis pada masa kolonial Belanda. Jepang sangat anti dengan berbagai hal yang berbau Eropa, sehingga lembaga pendidikan yang pernah didirikan oleh Belanda pun dianggap sebagai bagian dari hal-hal yang harus dilenyapkan. Lembaga pendidikan tinggi yang ditutup antara lain Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hoogeschool*) di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hoogeschool*) di Jakarta, dan Sekolah Kedokteran Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Artsenschool*) di Surabaya. Ketika Jepang akhirnya membuka kembali pendidikan tinggi di Indonesia, ternyata dua yang dibuka yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta yang berubah nama menjadi *Ika Dai Gakko*, serta Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang berubah nama menjadi *Kogyo Dai Gakko*.

Penutupan sekolah tinggi pada masa penjajahan Jepang, tentu saja berpengaruh terhadap suasana akademis pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya Jepang membuka lagi dua sekolah tinggi, namun corak lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh Jepang sangat militeristik. Murid-murid sekolah diperlakukan sebagai taruna militer, kepalanya digunduli, dengan corak pembelajaran yang fasis. Dunia akademis mati secara berlahan, buku-buku berhenti terbit, apalagi sebagian besar buku yang terbit di Indonesia pada masa sebelumnya banyak ditulis oleh penulis Belanda. Pada masa Jepang para akademisi Belanda ditangkap dan diinternir. Dengan demikian, maka tidak ada satupun karya historiografis perkotaan yang terbit pada masa penjajahan Jepang. Pengetahuan perkotaan pada periode Jepang pun suram atau malah gelap-gulita.

Di tengah-tengah kelangkaan kajian historiografis perkotaan pada masa penjajahan Jepang, penulis menemukan satu tulisan unik yang berjudul *Warisan Djepang*. Tulisan tersebut berbentuk puisi yang sangat panjang, lebih pantas disebut syair, dan ditulis oleh seorang penulis dengan nama samaran Piso Tjoekoer. Buku tersebut diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Firma Eng Hoat, dengan tanpa menyebutkan tahun terbit. Menilik dari nama samaran yang digunakan si penulis, buku tersebut diyulis pada masa penjajahan Jepang. Nama samaran digunakan untuk menyembunyikan identitas asli si penulis karena isi buku tersebut berisi kritik yang sangat tajam terhadap penjajah Jepang. Jika ketahuan identitas asli si penulis

kemungkinan besar yang bersangkutan bisa dihukum mati. Namun menilik dari judulnya, buku tersebut kemungkinan besar baru terbit setelah Jepang pergi dari Indonesia. *Warisan Djepang* merujuk pada kondisi dan situasi yang tercipta pada masa yang telah mendahului, yaitu masa penjajahan Jepang. Terdapat beberapa potong syair yang merekam kondisi kota pada waktu itu, terutama terkait dengan kondisi kesusahan rakyat kota-kota besar di Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Cuplikan syair yang menggambarkan kesusahan rakyat kota pada masa penjajahan Jepang adalah sebagai berikut:

*"Djeman Djepang bikin keadahan banjak beroba
Dan pakean dengan tambelan banyak tergoeba
Teroetama dalem kota bangsa Tarzan djadi tamba*

*Sedeng atoerannja Tarzan hidoep di dalem rimba!
Makanannja ada barang jang anjoet di kali
Sama bangke ajam marika ada dojan sekali
Itoe "santapan" laen orang tentoe merasa geli
Boeat marika asal makan, orang traoesa perdoeli*

*Sebagian besar pakeannja adalah dari tiker
Di waktoe malem di atas tanah tidoer melingker
Paperangan bikin hidoepnja semingkin soeker
Achirnja di pinggir djalan sering mati djengker!"¹*

Syair di atas adalah potongan dari sebuah syair yang amat panjang yang melukiskan gambaran kesengsaraan rakyat di perkotaan pada masa penjajahan Jepang. Di mana-mana orang menjadi amat sengsara dan sewaktu-waktu bisa mati tanpa melihat tempat. Banyak orang mati di jalanan karena mereka hidup di jalan dan tidak memiliki rumah. Sebagian besar berumah di tepi-tepi sungai dan di kolong-kolong jembatan. Jumlah pengemis dan tuna wisma meningkat tajam di kota-kota besar. Pengetahuan perkotaan pada masa penjajahan Jepang secara lebih luas tidak ditemukan dalam bentuk buku-buku yang lengkap, sehingga dapat dikatakan periode ini merupakan masa kegelapan.

Buku pengetahuan perkotaan Indonesia terkemuka yang terbit setelah Indonesia merdeka berjudul *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*. Buku ini menandai kebangkitan studi perkotaan Indonesia pada periode awal. Tidak saja karena buku tersebut ditulis oleh akademisi ahli perkotaan, namun yang lebih

¹ Mereka adalah pelarian dari desa. Lihat Piso Tjoekoer, *Warisan Djepang*, (Batavia: Firma Eng Hoat, TT), hlm. 18.

penting adalah bahwa buku tersebut ditulis berdasarkan pendekatan akademik dengan basis teoretik yang sangat kuat. Buku yang diterbitkan tahun 1958 oleh W. Van Hoeve Ltd (Den Haag dan Bandung) dan hak ciptanya dipegang oleh *Royal Tropical Institute*, Amsterdam, berisi empat bagian tulisan. Dua tulisan mengulas tentang aspek-aspek sosial dua kota besar di Indonesia, yaitu Batavia dan Bandung, satu tulisan mengulas tentang kota tua di Yogyakarta, yaitu Kota Gede, dan satu tulisan mengulas secara umum perkembangan Indonesia. Penulis utama buku ini adalah W. Brand dan H.J. van Mook.

Buku yang diedit oleh komite editor di bawah pimpinan sosiolog terkemuka, W.F. Wertheim, diangkat dari hasil penelitian yang dikoordinir oleh sebuah lembaga penelitian di Den Haag, yaitu *The Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research*. Awal tahun 1950an, ilmu-ilmu sosial mengalami perkembangan yang cukup pesat di Barat. Berbagai teori sosial dicoba diaplikasikan di lapangan dalam bentuk riset-riset terkemuka. Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka dan mengalami perubahan yang sangat cepat menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran penelitian ilmu-ilmu sosial. Pendekatan sosial dan historis banyak diterapkan dalam penelitian-penelitian awal tersebut. Yang cukup mengherankan khalayak awam Indonesia tentu saja keterlibatan H.J. van Mook dalam buku tersebut. Masyarakat Indonesia mengenal van Mook sebagai Wakil Gubernur Jenderal yang dikirim Belanda ke Indonesia pada awal Indonesia merdeka dengan tugas menguasai kembali Indonesia. Namanya tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena tertulis di buku-buku sejarah sebagai arsitek negara federasi Indonesia, yang dibentuk dengan cara memecah-belah wilayah-wilayah menjadi negara-negara bagian yang saling terpisah. Di balik sikap van Mook yang selalu dicurigai oleh rakyat Indonesia, ternyata memiliki kemampuan teoretis yang mumpuni dalam bidang sosial perkotaan. Tulisannya tentang Kota Gede menjadi tulisan pertama yang menyoroti kota tua tersebut dari aspek-aspek sosial.

Lima tahun sebelum tulisan yang diedit oleh Wertheim tersebut di atas terbit, di Kota Surabaya terbit buku yang ditulis oleh sejarawan terkemuka kota ini, G.H. von Faber. Buku ini terbit tahun 1953 dan diberi judul *Er werd een stad geboren: De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja*, diterbitkan oleh N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co. Surabaya. Sesuai dengan judulnya, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Lahirnya Sebuah Kota: Asal-usul Paling Tua Kota Surabaya" von Faber mencoba menelusuri asal-usul Kota Surabaya dari sumber-sumber yang paling lama. Buku tersebut melengkapi dua buku sebelumnya yang ditulis oleh von Faber, yaitu *Oud Soerabaia* yang menceritakan eksistensi kota tersebut pada masa kerajaan Majapahit sampai awal abad ke-20, serta *Nieuw Soerabaia* yang menceritakan kota tersebut pada awal abad ke-20 sampai tahun 1930an. Dengan terbitnya buku *Er werd een stad geboren*, maka pengetahuan dan rekaman perjalanan sejarah Kota Surabaya menjadi semakin lengkap, yaitu sejak

periode kuno sampai tahun 1930an. Buku-buku yang telah ditulis oleh G.H. von Faber telah mengukuhkan yang bersangkutan sebagai ahli sejarah sekaligus juru kunci Kota Surabaya pada masanya.

Pada akhir tahun 1950an kota-kota besar di Indonesia menerbitkan buku tentang kota masing-masing. Buku tersebut diterbitkan oleh pemerintah kota, biasanya oleh Jawatan Penerangan setempat, dan dimaksudkan sebagai buku informasi tentang kota bersangkutan. Isi buku tersebut bersifat ensiklopedis, sehingga berbagai informasi tentang kota bersangkutan dibahas secara informatif agar menjadi panduan dan pengetahuan bagi pembaca. Pembahasan aspek historis biasanya dibahas cukup lengkap dari periode ke periode. Beberapa kota besar yang hasil terbitannya bisa dilacak antara lain Surabaya dan Semarang. Judul buku tersebut semuanya mengacu pada kota yang dibahas, misalnya buku tentang Kota Semarang diberi judul *Semarang*. Buku *Semarang* ditulis oleh Soekirno yang pada waktu itu menjabat sebagai "Acting Kepala Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang," dan diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang tahun 1956. Pada periode yang hampir bersamaan Kota Surabaya menerbitkan buku serupa tetapi dengan judul yang agak berbeda, yaitu *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*. Buku yang ditulis oleh Sjamsu Koesmendan Pangestu B.W. tersebut diterbitkan Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya tahun 1957. Struktur isinya mirip dengan buku Semarang, dan tampaknya buku tersebut memiliki kesamaan dengan buku-buku serupa yang diterbitkan oleh kota-kota besar di Indonesia, karena ditujukan untuk kepentingan yang sama, yaitu sebagai buku informasi bagi khalayak tentang kota bersangkutan.

Pengetahuan Perkotaan dan Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial

Uraian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa realitas kota telah didokumentasikan dalam bentuk buku-buku yang cukup banyak. Kerja-kerja besar tersebut sebagian besar masih dilakukan oleh orang-orang Eropa yang tertarik dengan kondisi perkotaan di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya, pendokumentasian realitas perkotaan pada waktu itu juga terkait dengan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda yang membutuhkan landasan informasi yang banyak.

Tahun 1960an terjadi perubahan yang cukup besar terkait dengan perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia sudah mulai banyak, sementara hubungan antara Indonesia dengan negara bekas penjajahnya yaitu Belanda, benar-benar terputus total baik secara fisik maupun secara moral setelah terjadinya pengusiran besar-besaran warga Belanda pasca pemerintah menerapkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tahun 1957. Ratusan dosen-dosen warga Belanda yang semula mengajar di berbagai universitas di Indonesia terkena imbas

dari kebijakan tersebut dan dengan berat hati meninggalkan kampus-kampus di Indonesia. Celakanya, buku-buku berbahasa Belanda juga dibakar, sehingga kampus-kampus kehilangan sebagian buku-buku referensi.

Pada periode yang sama, mulai terbit hasil kajian akademisi Amerika Serikat tentang Indonesia yang dipandegani oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz muda pada tahun 1950an adalah seorang mahasiswa doktoral di Departemen Hubungan-hubungan Sosial di Harvard University, Amerika Serikat. Pada tahun 1953, untuk keperluan penyusunan disertasinya, Clifford Geertz beserta rekan-rekan mahasiswa Amerika Serikat, antara lain: Alice Dewey, Donald Fagg, Rufus Hendon, Jane Hendon, Robert Jay, Anne Jay, Edward Ryan, dan Anola Ryan, melakukan perjalanan ke Indonesia. Tujuannya adalah melakukan penelitian lapangan untuk kepentingan disertasinya. Mereka kemudian menyebar ke berbagai daerah, dan Geertz pada akhirnya memilih sebuah kota kecil di Kediri, yaitu Kota Pare. Selama satu tahun lebih ia berbaur dengan masyarakat Pare, dan hasilnya adalah sebuah disertasi yang sangat mencengangkan dan menjadi rujukan berbagai ilmuwan di berbagai belahan dunia yang tertarik dengan masalah Indonesia, sampai saat ini.

Disertasi Geertz yang diberi judul *The Religion of Java* (kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*) memang tidak bisa secara spesifik dianggap sebagai kajian perkotaan, karena hasil kajiannya lebih mengarah pada kajian antropologi-sosial. Namun, kerja Geertz bisa menjadi landasan teoretik untuk melakukan analisis sosial sebuah kota kecil (*town*). Terbukti, hasil sampingan dari kerja keras Geertz telah menghasilkan studi lain yang khusus tentang kota, yaitu sebuah buku yang diberi judul *The Social History of an Indonesian Town* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*). Disertasi diujikan pada musim semi tahun 1956 dan terbit sebagai buku tahun 1960, sementara buku *The Social History of an Indonesian Town* terbit tahun 1965.

Dua buku karya Geertz tersebut merupakan buku pertama yang utuh yang membahas dinamika perkotaan di Indonesia secara akademis dan merupakan hasil penelitian yang terstruktur. Khusus buku kedua yang membahas sebuah kota kecil dengan nama samaran Mojokuto, membahas secara total perubahan kawasan pedesaan menjadi sebuah kota kecil di Jawa yang memiliki ciri-ciri spesifik. Hasil kajian yang dilakukan oleh Geertz bisa dikatakan merupakan pembuktian atas teori evolusi tentang perkembangan kota sebagaimana digagas oleh E.E. Bergel dalam bukunya *Urban Sociology*.

Studi yang dilakukan oleh Geertz menjadi langkah awal bagaimana mengangkat realitas kota menjadi realitas pengetahuan yang terstruktur dan menghasilkan teori-teori perkotaan yang spesifik di Indonesia. Hal tersebut telah menjadikan kota di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya sebagai bahan analisis fenomena perkotaan di dunia ketiga. Secara perlahan perhatian

para akademisi terhadap kota-kota di Indonesia mulai naik, dari yang semula lebih banyak fokus pada kawasan pedesaan, sebagai dampak perhatian besar pemerintah kolonial terhadap kawasan tersebut dengan kebijakan sistem tanam paksa yang banyak membawa korban.

Menyusul terbitnya kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, tahun 1966 di Berkeley terbit karya Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*. Hasil studi yang diterbitkan oleh Institute of International Studies University of California, Berkeley secara umum menguraikan perubahan administrasi pengelolaan kota-kota di Indonesia sejak awal periode kolonial sampai akhir tahun 1960an, dikaitkan dengan hasil sensus penduduk yang pernah dilakukan tahun 1930 dan tahun 1961. Sebagaimana telah diuraikan di bagian depan, administrasi perkotaan di Indonesia yang otonom mulai diterapkan tahun 1905 dengan memberikan status *gemeente* kepada kota-kota terkemuka di Indonesia.

Pauline Dublin Milone menjelaskan secara kronologis perjalanan perkotaan di Indonesia, dengan menitikberatkan uraiannya pada perkembangan administrasi pengelolaan kota. Ia memulai penjelasannya untuk periode sebelum diterapkannya undang-undang otonomi perkotaan di Indonesia, dilanjutkan dengan pembahasan dimulainya penerapan undang-undang otonomi (dikenal dengan nama *Desentralisatie Wet 1903*) sampai periode penjajahan Jepang, kota-kota pada masa penjajahan Jepang, dan diakhiri dengan pembahasan periode kemerdekaan sampai tahun 1960an. Bagian akhir buku tersebut memuat data-data kuantitatif tentang perkembangan status kota serta data demografi yang sangat lengkap yang merupakan hasil sensus penduduk tahun 1930 dan tahun 1961.

Setelah hasil studi Dublin Milone terbit, beberapa tahun kemudian hasil studi yang dilakukan oleh John R.W. Smail tentang Kota Bandung pada awal revolusi juga terbit dengan judul *Bandung in The Early Revolution, 1945-1946*. Buku tersebut terbit tahun 1964 oleh Cornell Modern Indonesia Project, Universitas Cornell, Amerika Serikat. Awalnya, buku tersebut adalah disertasi yang diajukan oleh John Smail di Universitas Cornell. Fokus dari buku tersebut adalah pada masyarakat Kota Bandung dalam waktu yang amat singkat, yaitu pada masa awal revolusi Indonesia. Bisa dikatakan buku tersebut merupakan pendalaman atas studi terdahulu yang dilakukan oleh George McT Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* yang terbit di Universitas Cornell pula, tahun 1952.

Catatan Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas kota-kota di Indonesia telah lama menjadi perhatian masyarakat akademis. Sejak masa kolonial beberapa kota di Jawa tumbuh menjadi kota besar yang kompleks yang menampung berbagai aktivitas

penghuninya. Kota-kota semacam itu tumbuh sebagai kota dagang dan pusat pemerintahan kolonial. Akibat posisinya yang sentral tersebut maka kota-kota juga mendapat perhatian dari para pemerhati kota, yang kemudian menuliskannya menjadi buku. Pada awalnya kajian tentang kota-kota di Indonesia tidak dilakukan oleh para akademisi, melainkan oleh orang-orang yang tertarik untuk merekam aktivitas kota dan menuliskannya. Mereka adalah para pendatang Barat, beberapa orang Tionghoa, serta sedikit penulis Bumiputra. Perhatian mereka terhadap kota-kota di Indonesia lebih karena keunikan kota tersebut, misalnya penghuninya yang berlatar etnis yang beragam, aktivitas masyarakat, serta bangunan-bangunan baru yang tampak megah.

Pada perkembangan selanjutnya, kota menjadi perhatian para akademisi, utamanya akademisi dari Barat. Pengamatan mereka terhadap kota-kota di Indonesia telah menghasilkan kajian akademis yang menelorkan teori unik tentang kota-kota kolonial di kawasan Asia. Perspektif yang digunakan untuk mendalami kota-kota di Indonesia amat beragam yang pada perkembangan selanjutnya telah memperkaya khasanah teori-teori sosial tentang kota-kota Asia yang unik dan berbeda dengan kota-kota di Barat. Saat ini berbagai kajian tersebut telah menjadi rujukan penting para sejarawan yang akan mengkaji kota-kota di Indonesia pada masa kolonial sampai awal kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Bergel, E.E. (1955). *Urban Sociology*. USA: McGraw Hill.
- De Haan, F. (1922). *Oud-Batavia; gedenkboek uitgegeven door het Bataviasch Genootschap van K. en W. naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan des stad in 1919*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Geertz, Clifford. (1965). *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge: MIT Press.
- Groneman, J. (1900). *Reisgids voor Jogjakarta en omstreken*. Yogyakarta: W.A. van Hucht.
- Kahin, George McT. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kerchman, J.W.M. (1931). *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*. Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen.
- Koesmen, Sjamsu dan Pangestu B.W. (1957). *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*. Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya.
- Liem Thian Joe. (1933). *Riwajat Semarang*. Semarang: Ho Kim Joe.
- Milone, Pauline Dublin. (1966). *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*. Berkeley: Institute of International Studies University of California.

- Piso Tjoekoer. (1946). *Warisan Djepang*. Batavia: Firma Eng Hoat.
- Rassat, S.M. (1920). *Kota Betawi Semasa Dahoeloe*. Batavia: Balai Poestaka.
- Reitsma, S.A. (1926). *Bandoeng: The Mountain City of Netherlands India*. Bandung: G. Kolff.
- Reitsma, S.A. (1927). *Gids van Bandoeng en Midden-Priangan*. Bandung: Vorkink.
- Reitsma, S.A. dan W.H. Hoogland. (1921). *Gids van Bandoeng en omstreken*. Bandung: Vorkink.
- Si Tjerdik. (1930). *Melantjong ka Soerabaia*. Semarang: Kamadjoean.
- Smail, John R.W. (1964). *Bandung in The Early Revolution, 1945-1946*. Ithaca: Cornell University.
- Soekirno. (1956). *Semarang*. Semarang: Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang
- Van Kol, H.H. (1904). "De Residentie Djokjakarta." *Indische Gids*, 26.
- Von Faber, G.H. (1931). *Oud Soerabaia: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad (1906)*. Surabaya: Gemeente Soerabaia.
- Von Faber, G.H. (1934). *Nieuw Soerabaia: De geschiedenis van Indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931*. Surabaya: H. Van Ingen.
- Von Faber, G.H. (1953). *Er werd een stad geboren: De wordingsgeschiedenis van het oudste Soerabaja*. Surabaya: G. Kolff & Co.
- Wertheim, W.F. (ed.). (1958). *The Indonesian Town: Studies in Urban Sosciology*. Den Haag: W. Van Hoeve Ltd.